

Dinamika Sosial-Ekonomi: Analisis Kemiskinan Dan Ketimpangan Sosial Masyarakat Kabupaten Bima

Nabilah Bahri¹, Inka Nusamuda Pratama², M.Haikal Amirulhak³, Marsanda Maulani Azhari⁴, Nurrahmi Yullah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

nabilabahri.3831@gmail.com, inka.nusamuda@ummat.ac.id, haikall8055@gmail.com,
marsandamaulani@gmail.com, nrahmi513@gmail.com

Keywords:

Socio-economic,
Poverty,
Social inequality.

Abstract:

Poverty is one of the many problems in Bima district, the many social inequalities that occur between regional communities make a reduced sense of solidarity between regions in Bima Regency, West Nusa Tenggara Province. So with that this writing aims to find out how poverty and social inequality occur, the factors that influence it. In this study the author uses the integrated literature review method or literature study with this method the author searches and combines various information and analyzes statements of facts from selected scientific sources in the form of journal, relevant and valid articles. The data collection technique in this writing is by collecting existing data then compiled, and analyzed to provide an overview of the existing problem. The results of this study show that the people of Bima Regency experience poverty and social inequality in the region.

Kata Kunci:

Sosial-ekonomi,
Kemiskinan,
ketimpangan
Sosial

Abstrak:

Kemiskinan merupakan salah satu dari banyak persoalan di kabupaten Bima, banyaknya ketimpangan sosial yang terjadi antar masyarakat daerah membuat berkurangnya rasa solidaritas antar wilayah yang berada di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Maka dengan itu penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemiskinan dan ketimpangan sosial itu terjadi, faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode integrated literature review atau studi pustaka dengan metode ini penulis mencari dan menggabungkan berbagai informasi dan melakukan analisis pernyataan terhadap fakta dari sumber-sumber ilmiah yang dipilih berupa jurnal, artikel yang relevan dan valid. adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan cara mengumpulkan data-data yang ada kemudian disusun, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat Kabupaten Bima mengalami kemiskinan dan ketimpangan sosial dikarenakan minimnya pembangunan infrastruktur, pendidikan yang minim, fasilitas kesehatan yang belum memadai.

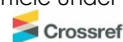
Article History:

Received : 16-05-2024

Online : 15-06-2024



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



A. LATARBELAKANG

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Pemahaman mengenai “kemiskinan” mestilah beranjak dari pendekatan berbasis hak (Mulyawan, 2024). Dalam pemahaman ini harus diakui bahwa seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama. Kemiskinan juga harus dipandang sebagai masalah multidimensional, tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar

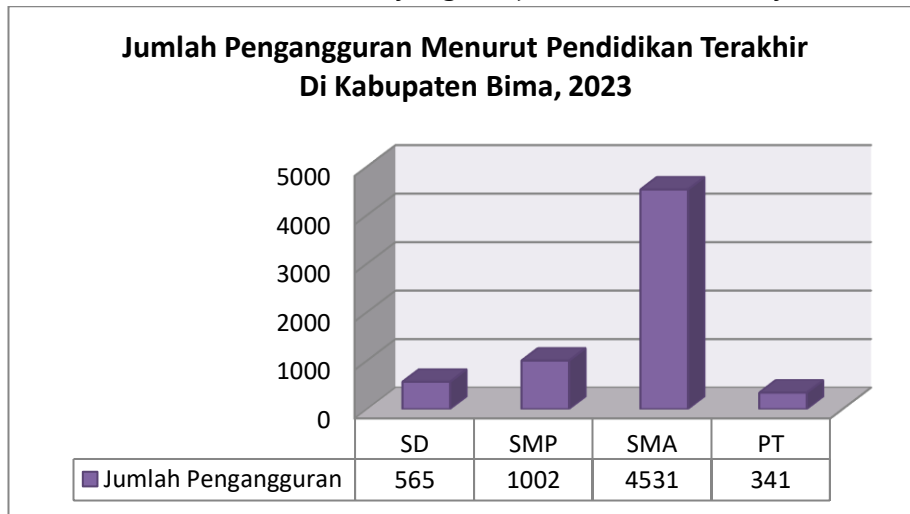
dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat (Pratama, 2023).

Kemiskinan yang antara lain ditandai oleh banyaknya penduduk yang hidup atau sangat rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan, masih merupakan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia (Pratama, 2023). Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023).

Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang yang kebutuhannya tidak dapat dipenuhi seperti contohnya kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan, serta sandang, perumahan, dan pangan di berbagai wilayah di Indonesia, meskipun negara ini memiliki kekayaan alam dan sumber daya manusia yang berpotensi untuk mencapai kemakmuran, sejumlah faktor kompleks terus menghambat kemajuan ini. (Kamaluddin et al., 2023)

Salah satu daerah yang mencerminkan tantangan ini adalah Kabupaten Bima, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana melihat sejarah awal berdirinya Kabupaten Bima pada tanggal 5 Juli 1640 M yang dimana Sultan Abdul kahir dinobatkan sebagai Sultan Bima I yang menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat islam, dengan adanya peristiwa tersebut kemudian di tetapkan sebagai hari jadi Bima yang diperingati setiap tahunnya oleh kabupaten Bima (Jasman & Arman; Pratama et al., 2023).

Dampak kemiskinan di Kabupaten Bima dapat dilihat dari kurangnya akses pendidikan dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang menjadi akibat dari adanya kemiskinan tersebut.



Gambar 1. Jumlah Pengangguran Menurut Pendidikan Terakhir Di Kabupaten Bima, 2023 (BPS Kab. Bima, 2022), (Data Diolah Penulis, 2024)

Ekonomi penduduk menjadi alasan utama penduduk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, sehingga perlunya bantuan sosial di bidang pendidikan, kenyataannya yang terlihat pada Gambar 1. Jumlah Pengangguran Menurut Pendidikan Terakhir Di Kabupaten Bima, tingkat pendidikan terakhir yang paling tinggi ialah tingkat SMA dengan 4531 jiwa sedangkan tingkat pengangguran yang paling rendah ialah Perguran Tinggi.

Hal ini juga menjadi tantangan signifikan bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Bima, bahwa kekurangan infrastruktur dan layanan dasar seperti, jalan, pemasok air, dan sanitasi, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (BPS Kab. Bima, 2022). Kemelaratan memang bisa menjadi penyebab berbagai masalah, Adanyan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bima mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi antar masyarakat Kabupaten Bima (Ahmad

Murad; Ibrahim & Pratama, 2024). Selain itu Kabupaten Bima juga menghadapi masalah yang berkaitan dengan ketimpangan sosial dan kemiskinan yang berdampak negatif pada ekonomi kabupaten ini sendiri (Fardi et al., 2023).

A. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *integrated literature review* atau studi pustaka dengan metode mencari, menggabungkan berbagai informasi dan melakukan analisis pernyataan terhadap fakta dari sumber sumber ilmiah yang dipilih berupa jurnal, artikel yang relevan dan valid. *Integrated Literature review* merupakan suatu proses atau metode dalam menyimpulkan sebuah literatur yang telah ada dan mempunyai kaitan terhadap topik atau masalah yang dihadapi, definisi lain terkait *Integrated Literature review* yang dianggap sebagai sebuah kegiatan dalam konsentrasi fokus yang merujuk pada suatu topik yang dianggap relevan menjadi Fokus utama dalam melakukan analisis terhadap naskah yang akan dipelajari Menurut (Tayah & Raya, 2021) menurutnya, *integrated iterature review* adalah uraian uraian yang memiliki bobot teori. *Integrated Literature review* yang menuntun kita untuk menyusun kerangka berpikir yang sesuai dengan temuan serta melakukan pengkolabucasian temuan temuan dari peneliti sebelumnya terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pemasalahan yang kita teliti.

Integrated Literature review memungkinkan penulis untuk dapat melakukan penyajian ulang terkait temuan yang pernah diterbitkan oleh peneliti sebelumnya dan memberikan temuan terbaru dari analisis yang dilakukan. Tinjauan literatur ini akan membenkan ringkasan berupa publikasi terbaik dan yang paling relevan terhadap hasil yang akan disajikan dalam bentuk jurnal Ruang lingkup yang digunakan dalam metode *Integrated Literature review* pada penelitian ini jurnal dan artikel publikasi terkait *Dinamika sosial, Kemiskinan, Ketimpangan sosial masyarakat Bima dan Integrated Literature review* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan literatur terbitan tahun (2017-2023) yang diperoleh dari berbagai jurnal yang dapat diakses dari download melalui Google scholar.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bima adalah kabupaten di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Woha. Pada tahun 2020 jumlah penduduk kabupaten ini sebanyak 532.677 jiwa, dengan kepadatan penduduk 156 jiwa/km².

Kabupaten Bima salah satu Kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi, pada table 1, Jumlah penduduk miskin telah mengalami perubahan selama beberapa tahun terakhir.

Data dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bima telah mengalami fluktuasi.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)		
		2021	2022	2023
1	Kabupaten Lombok Barat	105.24	99.00	102.71
2	Kabupaten Lombok Tengah	131.94	128.00	129.74
3	Kabupaten Lombok Timu	190.84	189.64	197.63
4	Kabupaten	66.00	64.73	67.40

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa)		
		2021	2022	2023
Sumbawa				
5	Kabupaten Dompu	33.26	33.27	34.38
6	Kabupaten Bima	75.49	74.46	74.74
7	Kabupaten Sumbawa Barat	21.51	21.28	21.77
8	Kabupaten Lombok Utara	61.70	59.82	60.12
9	Kota Mataram	44.45	45.30	46.20
10	Kota Bima	16.22	16.44	16.53
11	Nusa Tenggara Barat	746.66	731.94	751.23

Sumber: (NTB, n.d.2019), (Data diolah penulis, 2024)

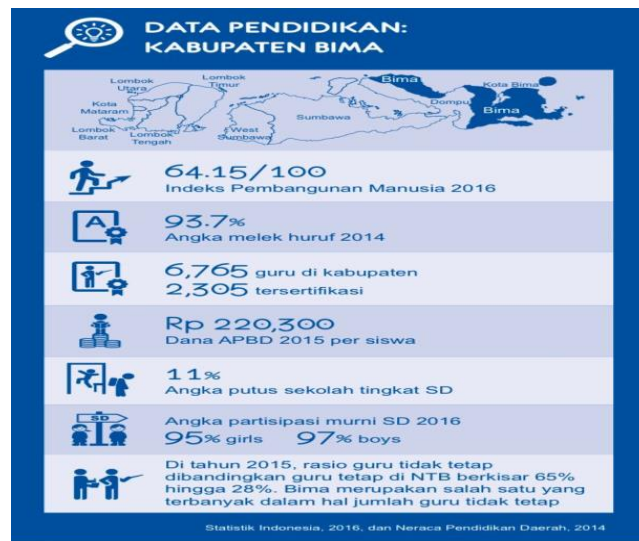
Secara umum, angka kemiskinan tersebut telah menurun pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bima mencapai 75,49 jiwa. Namun, pada tahun berikutnya, yaitu 2022, jumlah penduduk miskin tersebut telah menurun menjadi 74,46 jiwa. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bima telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tahun 2023 juga menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 74,74 jiwa. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bima telah terus berupaya untuk mengurangi kemiskinan melalui berbagai strategi dan program yang dilakukan.

Kemiskinan adalah suatu keadaan seseorang atau kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri seperti, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan kesejateraan. Secara etimologis "kemelaratan" berasal dari bahasa "miskin" menyiratkan tidak ada kelimpahan dan segala kesulitan. Kemelaratan adalah suatu keadaan yang berada dibawah garis standar nilai kebutuhan terkecil, baik untuk makanan ataupun yang bukan makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh oleh hasil survei. Angka kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

Adapun faktor penyebab kemiskinan itu sendiri adalah :

- a. Tingkat pendidikan rendah, kemiskinan bisa terjadi dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan tingkat pendidikan yang rendah dapat membuat seseorang membutuhkan kemampuan, pemahaman, dan informasi. Jika dilihat dalam dunia kerja atau bisnis pendidikan adalah arus kas yang butuh diperjuangkan jika ingin menjadi sukses. Jika banyak pengganguran yang terjadi maka itu salah satu dari alasan adanya tingkat pendidikan yang rendah.



Gambar 2. Data Pendidikan Kabupaten Bima Tahun Awal 2017

Sumber: Statistik Indonesia, 2016, dan Neraca Pendidikan Daerah, 2014

(Bima baseline research ID, n.d.)

Pada gambar 2 bisa dilihat bahwa pada tahun 2016, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bima mencapai 64,15 atau 93,7% dari total. Dalam hal pendidikan, Kabupaten Bima memiliki 6,765 guru yang bekerja, dengan 2,305 di antaranya telah tersertifikasi. Dan Dana APBD pada tahun 2015 untuk pendidikan per siswa sebesar Rp 220,300. Namun, terdapat beberapa hambatan yang di hadapi seperti, angka putus sekolah tingkat SD yang mencapai 11%. Meskipun demikian partisipasi murni SD di Kabupaten Bima pada tahun 2016 mencapai 95% untuk perempuan dan 97% untuk laki-laki. Dalam hal pengelolaan guru dan rasio guru tidak tetap dibandingkan guru tetap di Kabupaten Bima sekitar 65% hingga 28%, yang berbeda dengan rasio di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kabupaten Bima memiliki jumlah guru tidak tetap yang relatif tinggi, sehingga perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

- b. Kualitas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan, kemiskinan juga dipengaruhi oleh buruknya kualitas negara. Dikarenakan akses ataupun layanan pada biaya pengobatan yang sangat besar atau mahal bagi penduduk atau masyarakat di wilayah tersebut. Harga obat yang terbilang mahal dengan kapasitas kemampuan masyarakat yang tidak mampu dengan adanya hal tersebut membuat masyarakat terhambat untuk melakukan aktifitas atau kembali bekerja, hingga hal ini juga menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan.

Table 2. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bima, 2015

Kecamatan/SubDistrict	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik/Balai Kesehatan	Polindes/Village Maternity
1 Monta	1
2 Parado	1
3 Bolo	1	...	1
4 Madapangga	1
5 Woha	1
6 Belo	2

Kecamatan/ <i>SubDistrict</i>	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik/Balai Kesehatan	Polindes/ <i>Village Maternity</i>
7 Palibelo	1
8 Wawo	1
9 Langu	1
10 Lambitu	1
11 Sape	1
12 Lambu	1
13 Wera	2
14 Ambalawi	1
15 Donggo	1
16 Soromandi	1
17 Sanggar	1
18 Tambora	1
Kabupaten Bima	1	...	20

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, (Badan Pusat Statistik Bima, n.d.)

Dari Tabel 2 bisa dilihat bahwa Kabupaten Bima memiliki 20 pukesmas yang tersebar di berbagai kecamatan dan Kabupaten Bima memiliki total 1 rumah sakit, tidak ada rumah bersalin. Pada tahun 2015

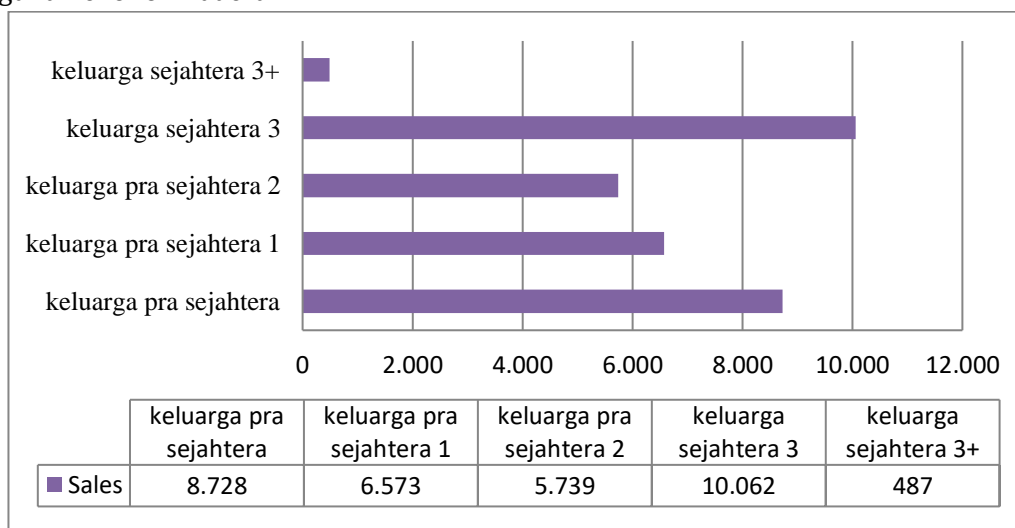
- c. Lapangan kerja, terbatasnya lapangan kerja menjadi alasan kemiskinan terjadi lapangan walaupun adanya lowongan pekerjaan yang terbuka dan membutuhkan posisi yang baru, lapangan yang terbuka sangat sedikit kemungkinan untuk orang miskin dikarenakan kemampuan dan modal yang dimiliki sangat terbatas, Menurut (kompas, n.d.-b) Ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah. Beberapa permasalahan ketenagakerjaan antara lain jumlah angkatan kerja yang banyak, kualitas angkatan kerja yang relatif rendah, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, dan kesempatan kerja masih terbatas. Peningkatan jumlah angkatan kerja tidak seiring dengan peningkatan kualitas angkatan kerja. Kualitas angkatan kerja tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikan, tetapi juga dari kesehatan dan kemampuan bekerja sesuai dengan keinginan. Kualitas yang rendah ini membuat tenaga kerja tidak tertampung di pasar kerja dan menjadi penganggur. Selain kualitas tenaga kerja, ketersediaan lapangan kerja merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi. Sektor pekerjaan yang menjadi kesempatan kerja paling diminati adalah sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Akan tetapi, sektor-sektor tersebut tidak mampu memberi kesempatan kerja yang luas bagi para tenaga kerja yang berjumlah banyak sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran. Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Kota Bima berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2022 (Sakernas 2022) sebanyak 140.438 jiwa. Dari seluruh penduduk usia kerja, 69,80 persen merupakan angkatan kerja dan sekitar 30,20 persen

bukan angkatan kerja yang mencakup kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, serta kegiatan lainnya meliputi penerima pendapatan, tidak mampu melakukan kegiatan apapun.

Ketimpangan pembangunan yang juga terjadi antar wilayah disuatu daerah juga merupakan aspek yang umum terjadi. Ketimpangan itu terjadi disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis yang terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga kemampuan daerah dalam proses pembangunan menjadi berbeda. Adapun perbedaan kekayaan daerah juga menimbulkan adanya wilayah maju (*develop region*) dan wilayah terbelakang (*underdevelopedregion*). Menurut ahli kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari masyarakat. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan di setiap wilayah atau daerah berbeda, sehingg menimbulkan jurang kesejahteraan di masyarakat wilayah tersebut (Nasution, 2020).

Ketimpangan tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan daerah, adanya ketimpangan akan mendorong daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidup agar tidak jauh tertinggal dengan daerah lainnya. Daerah-daerah tersebut akan bersaing untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini akan berdampak positif. Namun adapula dampak negatif yang ditimbulkan yaitu semakin tinggi ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif ini akan muncul seperti melemahnya stabilitas sosial dan solidaritas, inefisiensi ekonomi,serta ketimpangan lainnya.

Tingkat kemiskinan yang dicapai oleh masyarakat, sering kali di anggap sebagai indikator kualitas kesejahteraan manusia, yang dimana semakin rendah tingkat rata-rata kemiskinan dicapai, semakin tinggi juga kualitas tingkat kesejahteraan yang di miliki masyarakat tersebut. Angka kemiskinana di gunakan sebagai indikator karena merupakan salah satu penghambat dalam proses pembangunan di daerah. Karena itu, masalah kemiskinan harus dapat prioritas penangan bagi pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah.



Gambar 3. Gambaran Ketimpangan Sosial Di Kabupaten Bima
 Sumber Data : (Diolah Penulis, 2024), (Portal Pemerintah Kota Bima, n.d.)

Melihat pembangunan di daerah Kabupaten Bima mengalami permasalahan yaitu kurangnya pemerataan pembangunan, sehingga hal ini membuat pertumbuhan ekonomi masyarakat cenderung melemah, dan terjadilah kesenjangan sosial antar masyarakat ini sendiri, terjadinya hal

ini konsep perubahan sangat dibutuhkan untuk diterapkannya pemerataan dan merealisasikan pembangunan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sampai saat ini juga infrastruktur yang ada di beberapa kecamatan masih jauh dari harapan masyarakat, contohnya di kecamatan tambora dengan permasalahan infrastruktur pendidikan yang masih tergolong sangat minim dan juga tidak sedikit bangunan sekolah yang mengalami rusak berat, dan juga masih banyak permasalahan infrastruktur penghubung yang menuju wisata gunung tambora masih banyak yang rusak.

Contoh lainnya dapat dilihat di kecamatan Monta Jembatan di kecamatan ini rusak bahkan putus menuju Monta dalam. Selain hal ini hampir 4 km jalan rusak parah yang menuju ke daerah wisata pantai Rontu Monta.



Gambar 4. Jalan Menuju Pantai Rontu

Sumber: (RAKYAT, n.d.)

Belum lagi permasalahan air bersih yang dialami masyarakat kecamatan Wera dan kecamatan Langgudu dan bahkan ada beberapa desa yang tidak tersentuh oleh aliran listrik, yaitu desa sarae ruma dan desa pusu. Belum lagi akses jalannya yang susah untuk wilayah tersebut sehingga hampir setiap kecamatan yang berada di pelosok mengalami ketimpangan pembangunan, sehingga di harapkan pemerintah untuk mulai fokus pembangunan wilayah. (kompas, n.d.-a)

Melihat penjabaran tentang kemiskinan dan ketimpangan sosial di atas dapat diketahui bahwa kemiskinan dan ketimpangan sosial di Kabupaten Bima juga terjadi diantaranya jika dilihat penduduk di sekitar pesisir pantai di Kabupaten Bima sering diidentifikasi dengan masyarakat yang kurang mampu atau miskin, disebut miskin dikarenakan masih banyak masyarakat di pesisir pantai bergantung hidup dari sumber daya laut namun modal usaha yang digunakan sangat kecil, perlengkapan atau peralatan mereka pun masih sangat tradisional, dengan hal ini masyarakat di pesisir pantai khususnya yang berada di Kabupaten Bima mendapatkan hasil panen ikan yang sangat minim.

Kendalanya juga terlihat dari iklim dan musim di daerah tersebut. Ketidakpastian dari musim dan iklim ini yang menjadi kendala masyarakat yang bergantung hidup dan mata pencaharian sebagai nelayan.

Tingkat kemiskinan yang dicapai oleh masyarakat, sering kali di anggap sebagai indikator kualitas kesejahteraan manusia, yang dimana semakin rendah tingkat rata-rata kemiskinan dicapai, semakin tinggi juga kualitas tingkat kesejahteraan yang di miliki masyarakat tersebut. Angka kemiskinan di gunakan sebagai indikator karena merupakan salah satu penghambat dalam proses pembangunan di daerah. Karena itu, masalah kemiskinan harus dapat prioritas penanganan bagi pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah.

Untuk menghindari penduduk dari lingkaran kemiskinan diperlukan kebijaksanaan, komitmen, organisasi dan program serta pendekatan yang tepat. Diperlukan juga adab yang tidak memperlakukan masyarakat miskin sebagai objek tetapi sebagai subjek. Masyarakat yang kurang mampu bukanlah orang-orang yang tidak memiliki apapun, melainkan orang yang mempunyai sesuatu yang sedikit. Banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari kemiskinan seperti program pengembangan kawasan terpadu, proyek peningkatan pendapatan petani, nelayan, pedagang dan berbagai upaya lainnya, meskipun program tersebut dilaksanakan dan telah sedikit menurunkan tingkat kemiskinan di daerah-daerah tertentu namun tetap saja kesenjangan tersebut belum bisa diatasi sepenuhnya dan bahkan kesenjangan yang terjadi masih melebar dalam masyarakat, hal ini dikarenakan oleh adanya kesenjangan antar kelas sosial ataupun ketidak mertaan pembagian hasil.

C. SIMPULAN DAN SARAN

Dalam penulisan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan masih terjadi di Kabupaten Bima dan ketimpangan sosial pun juga masih terjadi antar daerah. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara-negara berkembang dan tertinggal. Masalah kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang terjadi tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang sosial, politik, budaya dan sistem politik lainnya.

Ketimpangan pembangunan yang juga terjadi antar wilayah disuatu daerah juga merupakan aspek yang umum terjadi. Ketimpangan itu terjadi disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis yang terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga kemampuan daerah dalam proses pembangunan menjadi berbeda.

Melihat pembangunan di daerah Kabupaten Bima mengalami permasalahan yaitu kurangnya pemerataan pembangunan, sehingga hal ini membuat pertumbuhan ekonomi masyarakat cenderung melemah, selain itu kurangnya fasilitas kesehatan dan tenaga mengajar. dan terjadilah kesenjangan sosial antar masyarakat ini sendiri. Imbasnya muncul premanisme, konflik antar desa, dan sedikitnya lapangan pekerjaan. Dengan terjadinya hal ini konsep perubahan sangat dibutuhkan untuk diterapkannya pemerataan dan merealisasikan pembangunan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dengan hal ini untuk menghindari penduduk dari lingkaran kemiskinan diperlukan kebijaksanaan, komitmen, organisasi dan program serta pendekatan yang tepat. Dibutuhkan pembangunan yang berkelanjutan dan perhatian pemerintah setempat agar lebih melihat daerah-daerah yang masih tertinggal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang selalu memberikan semangat yang sangat luarbiasa dan memberikan dukungan kepada saya untuk bisa menyelesaikan penelitian ini

serta terima kasih buat bapak dosen yang sudah mengajarkan saya dalam proses penyusunan penelitian ini, Semoga penelitian yang saya buat bisa bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

REFERENSI

- Ahmad Murad. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi Dikabupaten/Kota Di Ntb. In *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah - ALIANSI* (Vol. 2, Issue 2). download.garuda.kemdikbud.go.id. <https://doi.org/10.54712/aliansi.v2i2.37>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Bima. (n.d.). *Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bima, 2015*.
- Bima baseline research ID. (n.d.). *DATA PENDIDIKAN: KABUPATEN BIMA*.
- BPS Kab. Bima. (2022). Kabupaten Bima Dalam Angka 2022. *BPS Kab. Bima*, 1–13.
- Fardi, M., Inka Nusamuda Pratama, Darmansyah, & Amil. (2023). Transparansi Pendataan Program Bantuan Sosial Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pegesangan Kota Mataram. *Journal of Social and Policy Issues*, 3, 150–155. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.209>
- Ibrahim, I., & Pratama, I. N. (2024). Impresi Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 5(1), 1–14.
- Jasman, J., & Arman, A. (2023). Kondisi Sosial-Ekonomi Dan Potensi Pembangunan Kabupaten Bima. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG*
- Kamaluddin Kamaluddin, Muhammad Taufiq, & Haeril Haeril. (2023). Kebijakan Pembangunan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bima. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(1), 85–97. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i1.657>
- kompas. (n.d.-a). *Kekeringan, Warga Bima Tempuh Jarak 2 Km demi Air Bersih*.
- kompas. (n.d.-b). *Lapangan Perkerjaan yang terbatas*.
- Mulyawan, W. (2024). Evaluasi Etika Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bima: Menjaga Dignitas dan Kesejahteraan Masyarakat. *Public Service and Governance Journal*.
- Nasution, M. (2020). *KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH & HUBUNGANNYA DENGAN BELANJA PEMERINTAH : STUDI DI INDONESIA*. 5(2), 84–102.
- NTB, B. (n.d.). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa), 2021-2023*.
- Portal Pemerintah Kota Bima. (n.d.). *Ketimpangan Sosial Kabupaten Bima*.
- Pratama, I. N. (2023a). *Dinamika Kemiskinan Di Kota Mataram: Analisis Perubahan Tingkat Kemiskinan Dalam Dekade Terakhir*. 2(April), 1216–1222.
- Pratama, I. N. (2023b). Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance Di Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), 61–77. <https://doi.org/10.59050/jkk.v10i1.221>
- Pratama, I. N., Ibrahim, A. H., & Akbar, P. (2023). Pentahelix Collaboration Concept as an Effort to Accelerate Poverty Reduction in the Covid-19 Situation in the City of Mataram. *Jurnal Public Policy*, 9(1), 75. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i1.6439>
- RAKYAT, J. I. (n.d.). *Dua Tahun Jalur Pantai Rontu Rusak, Warga Aksi Boikot Tuntut Perbaikan*.
- Tayah, H., & Raya, U. P. (2021). *Metodologi Penelitian Literature Review : Keamanan Jaringan*. May.